

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Laporan keuangan tidak disusun dengan dasar kas karena informasi keuangan yang dihasilkan akan menjadi tidak relevan dengan tujuan laporan keuangan (SAK EMKM, 2016)

Tujuan laporan keuangan (SAK EMKM 2016:2) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3 Peluang dan Kendala Bisnis UMKM

Dalam menjalankan bisnis UMKM tentunya memiliki berbagai macam peluang dan kendala. Hal ini dituliskan oleh Bank Indonesia (2016). Kelebihan UMKM yang membuat usaha ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan adalah :

- 1) Memiliki fleksibilitas tinggi. Hal ini dikarenakan UMKM tidak bergantung pada Modal besar atau pinjaman dari luar seperti usaha besar. Dibuktikan dengan 96% UKM tetap bertahan pada krisis moneter 1998 dan krisis 2008 – 2009.
- 2) Membantu negara / pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja. Hal ini membuat *multiplier effect*-nya tinggi yang merupakan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Minimalnya konten impor yang digunakan. Karena skala usahanya, pelaku UMKM cenderung tidak bergantung pada komponen impor dan lebih bergantung pada sumber daya lokal sehingga menghemat devisa negara, dan juga memudahkan terjadinya inovasi teknologi dalam pengembangan produknya.

UMKM juga memiliki kendala dalam penerapannya yang disebabkan karena kelemahan sifat dari UMKM itu sendiri, yaitu :

1) Modal

Sekitar 60 – 70 % UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Hal ini disebabkan karena kendala administratif, manajemen bisnis UMKM yang masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional pribadi dan usaha.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pasar membuat pelaku usaha tidak mengetahui kebutuhan pasar, sehingga pengelolaan kualitas produk juga akan terganggu. Masalah kuantitas yang masih terbatas dalam pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi suatu kendala dalam bisnis UMKM. Tidak hanya itu, pemilik usaha sendiri juga masih sering terlibat dalam persoalan teknis sehingga terkadang menjadi tidak fokus dengan tujuan jangka panjang.

3) Akuntabilitas

Pelaku UMKM pada umumnya belum mempunyai akses pengetahuan mengenai keuangan, tenaga kerja yang kompeten, sistem administrasi keuangan dan manajemen keuangan yang baik.

4) Eksternal

Iklim usaha masih belum kondusif karena koordinasi antara lembaga pemerintah dengan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan dan juga belum tuntasnya

penanganan aspek legalitas badan usaha. UMKM juga umumnya memiliki infrastruktur yang lebih terbatas, sehingga terkadang harus lebih sering menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap bahan baku juga menjadi kendala sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.

2.1.4 Satandar Akuntansi Keuangan (SAK)

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik - tekniknya. Kerangka konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum, karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi. Di Indonesia badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. IAI telah menghimpun prinsip – prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut IAI (2009), Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang erada di bawah pengawasannya.

Menurut Suwardjono (2008), Standar Akuntansi adalah sebuah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar atau yang berwenang untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut.

Standar akuntansi pastinya dibuat karena adanya beberapa alasan yang bermanfaat bagi penggunaannya. Menurut Riahi-Belkaoui (2006) ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu :

- a. Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan.
- b. Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati – hatian dan kebebasan dalam “menjual” keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan – laporan tersebut.
- c. Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, efisiensi dan standar – standar sosial lainnya.
- d. Standar menumbuhkan minat dalam prinsip – prinsip dan teori – teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.

Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penting untuk menjadi pedoman untuk melakukan dan menerapkan bagi siapa saja dalam menyusun

laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Dalam mekanisme penyusunan Standar Akuntansi (SAK) harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan.

2.1.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (SAK ETAP, 2013)

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

SAK ETAP diberlakukan efektif oleh IAI pada tanggal 1 Januari 2011 yang terdiri dari 5 komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. (SAK EMKM, 2018)

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2018: 3) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) maka standar ini dimaksud untuk :

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.

2. Standar Akutansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Menurut SAK EMKM unsur – unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut :

- a. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.
- c. Ekuitas adalah hal residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi.
- d. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- e. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan asset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal.

Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu asset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut pada asset perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembuktian suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria :

- 1) Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos – pos asset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas.
- 2) Pos – pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup beberapa pos berikut :

- (a) Kas dan setara kas
- (b) Piutang
- (c) Persediaan
- (d) Aset tetap
- (e) Utang usaha
- (f) Utang bank
- (g) Ekuitas

2. Laporan laba rugi selama periode

Laporan laba rugi entitas mencakup beberapa pos berikut :

- (a) Pendapatan
- (b) Beban keuangan
- (c) Beban pajak

3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos – pos tertentu yang relevan. CALK memuat :

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- (c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Diajeng Amatullah Azzizah Rachmawati, Misrin Hariyadi, Andrianto (2019)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa laporan keuangan pada UMKM Batik Jumput Dahlia apakah sudah sesuai dengan SAK-	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan berbagai fenomena yang dialami peneliti	Hasil penelitian ini adalah tidak adanya laporan keuangan pada UMKM Batik Jumput Dahlia, belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar

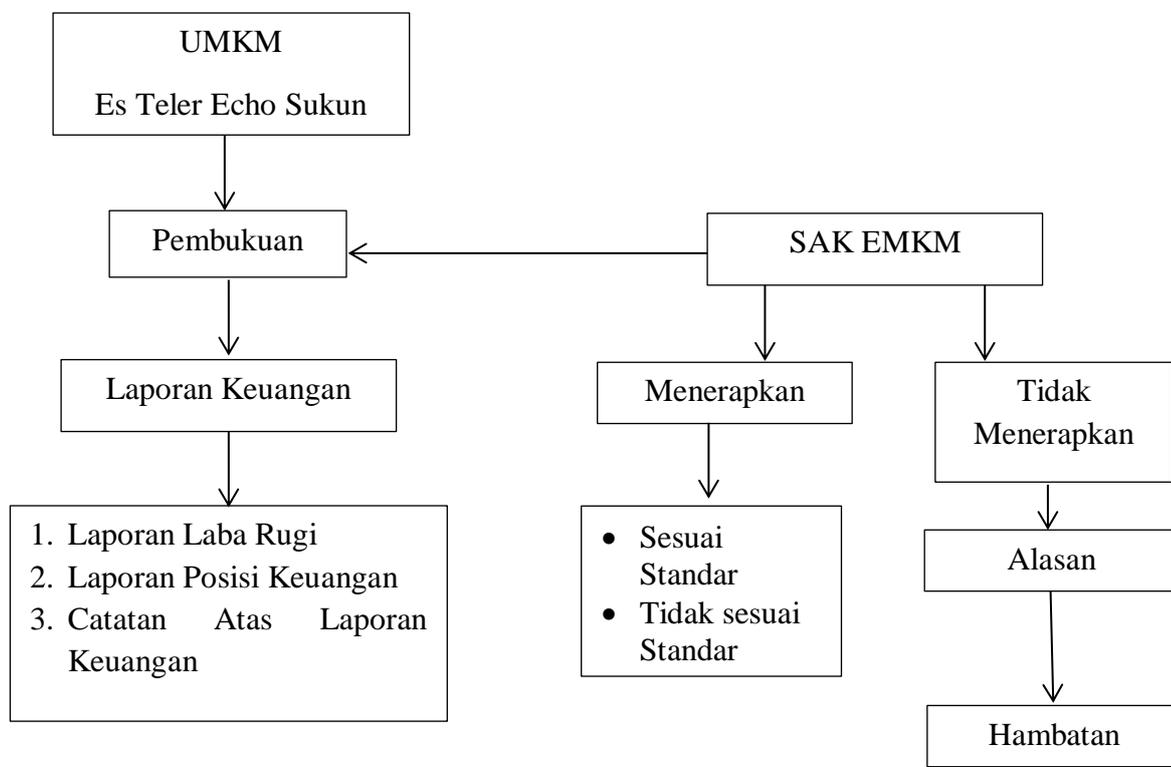
			EMKM atau belum.	dari berbagai sumber kepustakaan.	akuntansi yang berlaku untuk EMKM
2	Sularsih, H., & Sobir, A. (2019)	Penerapan akuntansi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan persamaan dasar akuntansi dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Pelaku UMKM hanya menggunakan perbukuan atau catatan sederhana untuk mencatat keuangan usaha. Alasan para UMKM tidak menyusun laporan keuangan karena akuntansi dianggap rumit dan sulit untuk diterapkan serta keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan.
3	Mortigor Afrizal Purba (2019)	Analisis Penerapan SAK EMKM pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Batam	Mengetahui penyajian laporan keuangan yang dilakukan pengelola UMKM Mawar	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan melakukan observasi partisipatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM Mawar belum disusun seperti acuan yang ditetapkan SAK EMKM.
4	Pio Septiana, Khairudin (2022)	Penerapan SAK EMKM pada UMKM Peternakan Ayam Boiler	Mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) di UMKM	Jenis penelitian yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian data primer dengan	Penerapan SAK EMKM pada UMKM peternakan Ayam Broiler belum diterapkan.

			Perternakan Ayam Broiler.	melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.	
5	Prajanto, A., & Septriana, I. (2018)	Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang)	<p>1. Mengetahui persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan besaran kredit yang diterima oleh UMKM.</p> <p>2. mengetahui prospek penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2017, serta dampaknya pada kualitas pelaporan keuangan UMKM.</p>	Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dengan menggunakan alat kuisioner dengan responden pengusaha UMKM di wilayah Kota Semarang sebagai sampel penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengusaha akan laporan keuangan masih sangat rendah sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha UMKM tidak berpengaruh pada besaran kredit yang diperoleh UMKM. Prospek implementasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat ini masih sangat minim karena pengusaha masih rendah dalam memahami pembukuan sesuai dengan SAK EMKM.
6	Ramdani, M. R., & Kamidin, M. (2018)	Implementasi SAK-ETAP pada UMKM Warkop di Kota Makassar.	Mengungkap fenomena pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP terhadap UMKM Warkop di Kota Makassar.	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pengelola UMKM Warkop hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing –

					masing Pengelola UMKM Warkop.
7	Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019)	Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).	Mengetahui implementasi Penyusunan Laporan keuangan pada UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) di Rejang Lebong.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sample 40 UMKM yang ada di Rejang Lebong dan menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan uji determinasi dengan alat uji SPSS 16.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap Akuntansi dan SAK-EMKM berpengaruh terhadap penyajian Laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Rejang Lebong ini belum sesuai dengan SAK-EMKM.
8	Simanjuntak, N., Sumual, T. E., & Bacilius, A. (2020).	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Sak-emkm: Studi Kasus pada UMKM Delli Tomohon	Mengetahui dan menyusun laporan keuangan berbasis SAK-EMKM pada Restoran Deili Tomohon.	Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dan data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Restoran Deili Tomohon belum mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.
9	Fitriyyah, R. A., & Sularsih, H. (2020).	Penerapan akuntansi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan studi kasus pada usaha sayangan di Desa Kebakalan.	Mengetahui laporan keuangan Usaha Sayangan apakah sudah sesuai dengan SAK EMKM dan untuk mengetahui kendala dalam membuat laporan keuangan.	Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah (1) wawancara (2) observasi (3) dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemilik usaha masih sederhana yang tidak sesuai dengan SAK EMKM dan tidak akurat karena tidak melakukan pencatatan rutin dan keuangan masih

					bercampur dengan keuangan pribadi.
10	Janrosi, V. S. E. (2018).	Analisis persepsi pelaku umkm dan sosialisasi sak emkm terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM: persepsi pelaku UMKM, sosialisasi SAK EMKM dan penggunaan SAK EMKM	Mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap diberlakukannya Laporan Keuangan yang berbasis SAK EMKM serta mensosialisasikan SAK EMKM terhadap pelaku UMKM yang belum mengetahui SAK EMKM.	Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian eksploratif dan deskriptif.	Hasil penelitian ini prespsi pelaku UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM.
11	Falahannau fal, B., & Budiantara, M. (2023)	Penyusunan Laporan Keuangan Berstandar Sak Emkm Pada Umkm Bengkel Motor Honda Di Sleman	Mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Bengkel Motor Honda di sleman yang sesuai dengan sistematis rumus laporan keuangan SAK EMKM.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah pelaku UMKM belum membuat laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah